FUNGSI PASAR SEBAGAI KATALISATOR DALAM UPAYA RECOVERY PASCA KONFLIK SOSIAL : SUATU KAJIAN LITERATUR

Alfrojems

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia alfro.jems@gmail.com

ABSTRACT

Development and conflict are two distinct yet interrelated elements within society. Although development is generally associated with positive progress, the process can also generate negative consequences in the form of social conflict. Conversely, social conflict may trigger responses that promote further development, particularly in addressing inequalities or systemic issues. Post-conflict recovery efforts are therefore essential. Several key aspects can accelerate these efforts, including security and basic needs, economic recovery, social cohesion and justice, governance and legal frameworks, and community empowerment. Furthermore, markets can be defined in two categories: traditional markets and modern markets. Accordingly, this study aims to examine the function of markets as catalysts in post-conflict social recovery efforts, both in traditional and modern contexts. This research employs a literature review method. The findings indicate that markets function as catalysts in post-conflict recovery efforts, both in traditional and modern contexts. This is attributed to several key functions of markets, including their roles as gathering spaces for diverse visitors, venues for communication with various interaction styles, sites of trade and economic exchange, platforms for community empowerment, centers of economic activity, and arenas for social contribution.

Keywords: Traditional Market, Modern Market, Social Conflict, Mitigation, Curative, and Catalyst

ABSTRAK

Pembangunan dan konflik merupakan dua elemen yang berbeda namun saling berkaitan dalam masyarakat. Meskipun pembangunan umumnya diasosiasikan dengan kemajuan yang bersifat positif, proses ini juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif berupa konflik sosial. Sebaliknya, konflik sosial dapat memicu respons yang mendorong terjadinya pembangunan lebih lanjut, terutama dalam menangani ketimpangan atau permasalahan sistemik. Upaya recovery pasca konflik sangat diperlukan. Beberapa aspek yang dapat mengakselerasi upaya tersebut adalah keamanan dan kebutuhan dasar, Pemulihan ekonomi, kohesi sosial & keadilan, pemerintah & peraturan hukum, dan pemberdayaan komunitas. Lebih lanjut pasar jika didefinisikan dapat dibagi menjadi dua yakni tradisional dan modern. Pasar dibedakan menjadi dua yakni pasar tradisional dan pasar modern. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji fungsi pasar sebagai katalisator dalam upaya recovery pasca konflik sosial baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pasar memiliki fungsi sebagai katalisator dalam upaya recovery pasca konflik baik itu untuk pasar tradisional maupun pasar modern hal ini karena beberapa fungsi pasar seperti tempat berkumpul beragam pengunjung, tempat komunikasi dengan beragam gaya komunikasi, tempat terjadinya transaksi jual beli, tempat pemberdayaan masyarakat, tempat aktivitas ekonomi, dan tempat bagi masyarakat kontribusi.

Kata kunci: Pasar Tradisional, Pasar Modern, Konflik Sosial, Mitigasi, Kuratif, dan Katalisator

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia. Perbedaan identitas etnis, agama, budaya, kepentingan politik, maupun distribusi sumber daya ekonomi seringkali menjadi pemicu lahirnya ketegangan sosial. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 281 peristiwa konflik sosial di Indonesia, sedangkan pada periode Januari sampai dengan Maret 2024 saja telah terjadi 83 kasus konflik di berbagai daerah (Badan Pusat Statistik, 2024; Katadata, 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa konflik sosial masih menjadi persoalan serius yang berulang dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Konflik sosial tidak hanya menimbulkan korban fisik dan material, tetapi juga berdampak luas terhadap kohesi sosial masyarakat. Trauma psikologis, rusaknya jaringan sosial, hilangnya rasa saling percaya, hingga menurunnya kualitas hidup warga merupakan konsekuensi yang umum ditemui pasca konflik (Varshney, 2002). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pembangunan sosial-ekonomi karena masyarakat terdampak kehilangan kemampuan kolektif untuk membangun kembali kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Fukushima (2001) yang menyebutkan bahwa masalah sosial, termasuk konflik, adalah kondisi yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial sehingga memerlukan penanganan segera untuk mencegah meluasnya dampak negatif.

Salah satu sektor yang sering terdampak sekaligus memiliki potensi strategis dalam proses pemulihan pasca konflik adalah pasar. Pasar, baik tradisional maupun modern, tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial lintas kelompok. Menurut Scott (1998), pasar tradisional berperan sebagai arena pertukaran bukan hanya barang dan jasa, melainkan juga nilai, norma, dan relasi sosial yang memperkuat kohesi komunitas. Dalam konteks Indonesia, pasar memiliki fungsi sosial yang kental karena menjadi ruang pertemuan antara beragam identitas sosial. Namun, di sisi lain, pasar juga rentan menjadi titik gesekan. Konflik yang terjadi di kawasan pasar umumnya berkaitan dengan perebutan lahan, distribusi akses ekonomi yang timpang, hingga kebijakan tata kelola yang tidak berpihak pada masyarakat kecil (Suwarno, 2015). Akibatnya, pasar yang seharusnya menjadi sarana pemersatu justru berpotensi memperuncing ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik.

Konflik sosial merupakan salah satu tantangan serius dalam dinamika kehidupan masyarakat karena meninggalkan kerusakan multidimensi, mulai dari sosial, ekonomi, hingga psikologis. Pada tahun 2023, tercatat ratusan kasus konflik sosial di Indonesia, dan tren ini masih berlanjut pada awal 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024; Katadata, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik bukan hanya mengancam stabilitas sosial, melainkan juga melemahkan tatanan ekonomi serta kepercayaan antarwarga. Oleh karena itu, pemulihan pasca konflik harus dipahami sebagai sebuah proses komprehensif yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Aspek pertama yang sangat krusial adalah keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pasca konflik, masyarakat umumnya menghadapi trauma, rasa takut, serta keterbatasan akses terhadap pangan, air bersih, dan tempat tinggal. Situasi ini menuntut hadirnya perlindungan keamanan yang konsisten dan pemenuhan kebutuhan vital sebagai fondasi terciptanya stabilitas

awal (Burton, 1990; UNHCR, 2019). Tanpa kondisi dasar ini, masyarakat akan sulit beranjak ke tahap pemulihan yang lebih jauh.

Selain itu, pemulihan ekonomi, penguatan kohesi sosial, dan penegakan keadilan menjadi komponen yang saling terkait dalam rekonstruksi pasca konflik. Kerusakan infrastruktur dan terganggunya kegiatan pasar seringkali menyebabkan hilangnya sumber penghidupan, sehingga pemulihan ekonomi lokal penting untuk mencegah ketegangan baru (Collier et al., 2003). Di sisi lain, pasar dapat berfungsi sebagai ruang interaksi yang menghidupkan kembali kohesi sosial dan kepercayaan antarwarga (Varshney, 2002). Namun, keberlanjutan perdamaian tidak mungkin tercapai tanpa adanya keadilan. Karena itu, mekanisme hukum maupun rekonsiliasi harus ditegakkan agar tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan (Galtung, 1969; Hayner, 2011).

Peran pemerintah dan kerangka hukum juga sangat penting untuk memastikan pemulihan berjalan efektif. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menghadirkan regulasi yang adil, serta menjamin lembaga negara bekerja secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak konflik. Tanpa aturan hukum yang jelas dan aparat yang berfungsi, proses pemulihan berpotensi stagnan bahkan gagal (World Bank, 2011; Braithwaite, 2002). Dengan demikian, tata kelola yang baik dan sistem hukum yang kuat menjadi penopang keberhasilan rekonstruksi sosial.

Tidak kalah penting, pemberdayaan komunitas berperan sebagai motor penggerak pemulihan berkelanjutan. Masyarakat harus diposisikan bukan sekadar sebagai penerima bantuan, melainkan aktor utama dalam membangun kembali lingkungannya. Program pemberdayaan yang menekankan partisipasi, peningkatan kapasitas, serta solidaritas lokal terbukti efektif dalam memperkuat ketahanan sosial sekaligus mencegah munculnya kembali konflik (Chambers, 1997; Narayan, 2002; UNDP, 2008).

Kerangka recovery pasca konflik, keberadaan pasar memiliki arti penting. Pemulihan tidak hanya berbicara mengenai rekonstruksi fisik infrastruktur publik yang rusak, tetapi juga mencakup upaya membangun kembali rasa saling percaya, solidaritas sosial, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat (Colletta & Cullen, 2000). Melalui aktivitas jual beli di pasar, masyarakat yang sebelumnya terpecah akibat konflik dapat kembali berinteraksi dalam ruang ekonomi yang netral. Hal ini memperkuat argumen bahwa pasar dapat berfungsi sebagai katalisator dalam proses pemulihan sosial-ekonomi setelah terjadinya konflik. Dengan demikian, penelitian mengenai fungsi pasar dalam recovery pasca konflik menjadi penting untuk dilakukan.

Salah satu aspek utama dalam proses recovery konflik sosial adalah membangun rasa saling percaya dalam Masyarakat. Pasar sebagai salah satu tempat publik menjadi wadah yang tepat karena sangat erat dengan aktovotas pemunuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pasar, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial masyarakat pasca konflik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana fungsi pasar mampu untuk dapat berkontribusi dalam proses katalisator recovery pasca konflik sosial baik untuk pasar tradisional maupun modern?.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur (literature review) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap fenomena sosial melalui analisis sistematis terhadap berbagai sumber tertulis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara kritis hasil-hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan observasi atau wawancara lapangan secara langsung (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

Sumber data sekunder yang digunakan meliputi publikasi ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, laporan institusi, serta artikel yang memiliki keterkaitan substansial dengan isu penelitian (Bowen, 2009). Dengan memanfaatkan data sekunder secara eksklusif, penelitian ini mampu menghimpun beragam perspektif yang telah teruji secara akademis dan terdokumentasi secara formal.

Tahap pertama dalam studi literatur adalah identifikasi masalah penelitian dan perumusan fokus kajian, yang dilakukan dengan meninjau isu utama yang berkembang dalam bidang kajian. Pada tahap ini, peneliti menetapkan kata kunci (keywords) yang relevan serta menentukan batasan topik agar literatur yang dikaji tetap fokus dan kontekstual (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019).

Tahap berikutnya adalah seleksi dan kriteria Dimana dari hasil pencarian awal, dilakukan seleksi literatur dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi literatur antara lain:

- 1. Relevan dengan fokus penelitian, dan
- 2. Memiliki kredibilitas akademik yang jelas.

Sementara itu, literatur yang bersifat opini populer atau tidak melewati proses *peerreview* dikeluarkan dari analisis (Kitchenham & Charters, 2007; Torraco, 2016).

Selanjutnya adalah analisis dan sintesis literatur, yang dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk mengekstraksi ide-ide utama dari masing-masing dokumen, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema sentral, membangun kategori konseptual, serta memetakan hubungan antar konsep (Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017). Proses ini bersifat iteratif, di mana temuan dari satu sumber dibandingkan dan dikonfirmasi dengan sumber lain untuk menghasilkan pemahaman yang terintegrasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Tahap akhir adalah interpretasi dan integrasi temuan, di mana hasil analisis tematik ditafsirkan dalam konteks sosial, teoretis, dan praktis yang relevan. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna yang terkandung di balik data dan mengaitkannya dengan kerangka konseptual penelitian (Snyder, 2019; Webster & Watson, 2002). Hasil akhirnya berupa sintesis konseptual yang memperkaya pengetahuan akademik sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan riset lanjutan.

Secara keseluruhan, desain metodologis penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip systematic qualitative literature review, yaitu sistematis, transparan, dan dapat direplikasi.

Dengan tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam, reflektif, dan kontekstual terhadap isu yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat lima hal utama yang diperlukan untuk dapat memastikan terciptanya social healing sebagai sebuah proses recovery pasca terjadinya konflik sosial, kelima aspek tersebut antara lain keamanan dan kebutuhan dasar, Pemulihan ekonomi, kohesi sosial & keadilan, pemerintah & peraturan hukum, dan pemberdayaan komunitas (Johnson, 2023). Keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pondasi utama dalam proses recovery pasca konflik sosial. Tanpa jaminan keamanan, masyarakat tidak akan berani kembali beraktivitas di ruang publik, termasuk pasar sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi (Collier et al., 2003; Lederach, 1997). Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan menjadi syarat minimum agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang layak, sekaligus mengurangi kerentanan akibat konflik (Maslow, 1943; Sphere Project, 2018). Pemenuhan kebutuhan ini juga berdampak pada meningkatnya rasa percaya dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-ekonomi (Stewart, 2008). Oleh karena itu, keamanan dan kebutuhan dasar memiliki keterkaitan erat: tanpa keamanan distribusi kebutuhan terhambat, sementara tanpa kebutuhan dasar rasa aman tidak tercapai. Dalam konteks ini, pasar dapat berfungsi sebagai katalisator, karena melalui aktivitas perdagangan yang aman dan terjamin, distribusi kebutuhan dasar masyarakat dapat berlangsung, sekaligus memperkuat rekonsiliasi sosial.

Pemulihan pasca konflik tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi utama, yakni ekonomi, kohesi sosial, dan keadilan. Pemulihan ekonomi penting karena konflik umumnya merusak infrastruktur, memutus mata pencaharian, serta menghambat aktivitas pasar; oleh sebab itu, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan sektor informal menjadi kunci untuk menghidupkan kembali stabilitas dan memberi insentif perdamaian (Collier et al., 2003; World Bank, 2011). Sementara itu, kohesi sosial dibutuhkan untuk membangun kembali jaringan kepercayaan yang rusak akibat kekerasan, di mana ruang interaksi seperti pasar dapat menjadi arena strategis bagi kelompok yang berbeda untuk bekerja sama dan membentuk solidaritas baru (Varshney, 2002; Putnam, 2000). Di sisi lain, keadilan harus ditegakkan agar masyarakat tidak lagi merasa termarjinalkan, baik melalui penyelesaian sengketa, pemulihan hak korban, maupun distribusi akses ekonomi yang setara, karena tanpa itu konflik berisiko berulang (Galtung, 1969; Hayner, 2011). Dengan demikian, integrasi antara pemulihan ekonomi, penguatan kohesi sosial, dan penegakan keadilan merupakan landasan penting untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan pasca konflik.

Peran pemerintah dan keberadaan peraturan hukum merupakan faktor krusial dalam menjamin keberhasilan proses recovery pasca konflik sosial. Pemerintah berfungsi sebagai aktor utama yang mengkoordinasikan rekonstruksi infrastruktur, menyalurkan bantuan, serta menciptakan kebijakan yang inklusif untuk mencegah ketimpangan baru (OECD, 2008; World Bank, 2011). Keberadaan peraturan hukum yang adil dan dapat ditegakkan secara konsisten sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, karena hukum yang lemah berpotensi memicu ketidakpuasan dan memperbesar peluang konflik berulang (North, Wallis & Weingast, 2009). Lebih jauh, regulasi yang mengatur pengelolaan sumber

daya, hak kepemilikan, serta penyelesaian sengketa berperan dalam menjaga keadilan distribusi ekonomi dan mempererat kohesi sosial (UNDP, 2008). Dalam konteks pasar, kehadiran pemerintah melalui penataan ruang, perlindungan pedagang kecil, dan regulasi kompetisi yang sehat dapat menjadikan pasar bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi juga simbol hadirnya negara dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian jangka panjang.

Pemberdayaan komunitas memiliki peran strategis dalam proses pemulihan pasca konflik sosial karena mampu memperkuat kapasitas lokal, membangun kembali rasa percaya diri, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, melainkan juga sebagai aktor utama dalam merumuskan solusi, mengelola sumber daya, dan memperkuat jejaring sosial (Chambers, 1997; UNDP, 2008). Program pemberdayaan yang efektif, seperti pelatihan keterampilan, dukungan usaha mikro, dan forum musyawarah komunitas, dapat mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mengurangi risiko kembalinya konflik (Narayan, 2002). Dengan demikian, pemberdayaan komunitas berfungsi sebagai fondasi bagi terciptanya masyarakat yang resilien, inklusif, dan memiliki ketahanan sosial-ekonomi jangka panjang.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengumpulan data dan proses analisis data dengan melakukan kajian maka diperoleh klasifikasi data yang menjadi pembeda pasar tradisional dan pasar modern adalah sebagai berikut dengan rincian klasifikasi memberikan alasan mengapa pasar tradisional memberikan kesempatan bagi masyarakat yang pernah mengalami konflik untuk dapat recovery setelah mengalami proses konflik. Jika ditinjau lebih dalam maka baik pasar tradisional maupun modern memiliki deskripsi dengan masing-masing fungsi sebagai berikut

A. Tempat Berkumpul oleh Beragam Pengunjung

Temuan hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa pasar tradisional cenderung dikunjungi oleh masyarakat dengan latar belakang sosial dan tingkat ekonomi yang beragam. Sementara itu, pola kunjungan pada pasar tradisional dan pasar modern memperlihatkan adanya perbedaan karakteristik yang cukup signifikan di antara keduanya.

Pasar Tradisional

Pasar tradisional umumnya didominasi oleh masyarakat lokal yang berasal dari beragam latar belakang sosial dan ekonomi. Karakteristik pengunjung sangat beragam, mulai dari kelompok menengah ke bawah hingga masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Menurut keterangan beberapa informan, hal ini terjadi karena pasar tradisional relatif mudah diakses oleh semua kalangan dan menciptakan suasana yang ramah bagi masyarakat. Lokasi pasar yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan juga mencerminkan adanya kekuatan kolektif masyarakat, khususnya dalam praktik tawar-menawar yang menjadi bagian dari dinamika transaksi. Situasi ini memperlihatkan bahwa pasar tradisional memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam proses pemulihan sosial pasca konflik, khususnya dalam membangun kohesi sosial. Dengan demikian, aspek kohesi sosial yang dibutuhkan dalam recovery konflik dapat terakomodasi melalui interaksi sosial yang terbangun di lingkungan pasar tradisional, terutama melalui keberagaman pengunjungnya.

Pasar Modern

Pasar modern umumnya didominasi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas dengan kecenderungan gaya hidup urban. Sebagian besar pasar modern berlokasi di kawasan perkotaan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang relatif lengkap serta memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi pengunjung, pasar modern dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses pemulihan pasca konflik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Seperti halnya pasar tradisional, keberadaan pasar modern juga mampu mengakomodasi aspek-aspek penting yang diperlukan dalam recovery sosial, meskipun titik tekan utamanya lebih pada pemenuhan kebutuhan pengunjung. Dengan demikian, orientasi pengunjung pasar modern dalam konteks pemulihan pasca konflik dapat dipahami terutama melalui perannya dalam menjamin akses terhadap kebutuhan masyarakat secara konsisten.

B. Tempat Komunikasi dengan Beragam Gaya Komunikasi

Berdasarkan hasil diskusi dan pengumpulan data, gaya komunikasi yang dimaksud berkaitan dengan pola interaksi yang terjadi dalam proses transaksi, baik antara pengunjung dengan pedagang maupun antar pengunjung itu sendiri di pasar tradisional dan pasar modern. Kedua jenis pasar tersebut menunjukkan karakteristik komunikasi yang berbeda, sehingga dapat dideskripsikan secara lebih rinci sebagai berikut.

Pasar Tradisional

Pasar tradisional memiliki basis komunitas yang kuat dengan karakteristik interaksi sosial yang khas. Salah satu ciri utama yang menonjol adalah adanya komunikasi langsung dan akrab antara penjual dan pembeli, yang sering kali melibatkan proses tawar-menawar. Situasi ini menunjukkan bahwa pasar tradisional berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam pemulihan kohesi sosial dan keadilan pasca konflik. Pola komunikasi yang fleksibel memungkinkan setiap individu, tanpa memandang latar belakang, untuk berinteraksi secara setara dalam proses jual beli. Dengan demikian, kohesi tercermin dari terciptanya interaksi yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat, sedangkan aspek keadilan terlihat dari kesempatan yang sama bagi siapapun untuk terlibat dalam komunikasi dan transaksi di pasar tradisional.

Pasar Modern

Pasar modern umumnya dikunjungi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas dan berlokasi di kawasan perkotaan. Karakteristik ini membentuk pola komunikasi yang cenderung lebih personal, namun minim interaksi sosial karena sistem yang bersifat swalayan membuat hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih individual serta transaksional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar modern memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap proses pemulihan pasca konflik, khususnya melalui aspek pemulihan ekonomi. Dengan gaya komunikasi yang efisien dan terfokus pada transaksi, pasar modern mampu mendukung akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara konsisten. Hal ini menjadikan pasar modern relevan dalam konteks pemulihan ekonomi, sekaligus memperlihatkan pentingnya peran pemerintah dan kebijakan dalam memastikan keberlanjutannya sebagai bagian dari strategi recovery sosial.

C. Tempat Terjadinya Transaksi Jual Beli

Pasar pada dasarnya merupakan ruang terjadinya transaksi jual beli, di mana transaksi dimaknai sebagai pertukaran barang dan uang yang melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli. Hasil pengolahan data menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas terkait mekanisme harga di pasar tradisional dan pasar modern. Pada pasar tradisional, harga bersifat lebih fleksibel karena masih memungkinkan proses tawar-menawar. Sebaliknya, di pasar modern, harga ditetapkan secara formal dan cenderung tetap, mengikuti kebijakan internal pengelola pasar yang dianggap wajar serta berlaku bagi seluruh konsumen.

Pasar Tradisional

Pasar tradisional umumnya berbasis pada komunitas pedesaan, yang mayoritas masyarakatnya memiliki kondisi ekonomi relatif lebih rendah dibandingkan dengan karakteristik konsumen di pasar modern. Hal ini menjadikan harga di pasar tradisional lebih fleksibel karena masih memungkinkan adanya proses tawar-menawar. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pasar tradisional memiliki peran penting dalam pemulihan pasca konflik, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan sosial, pemulihan ekonomi, penguatan kohesi sosial, dukungan kebijakan pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui interaksi negosiasi antara penjual dan pembeli, tidak hanya terjadi transaksi ekonomi, tetapi juga tercipta ruang komunikasi yang mempererat hubungan sosial. Dengan demikian, pasar tradisional dapat mengakomodasi hampir seluruh aspek yang diperlukan dalam strategi pemulihan pasca konflik, terutama terkait fleksibilitas harga yang memungkinkan terciptanya akses yang lebih adil bagi berbagai lapisan masyarakat.

Pasar Modern

Pasar modern umumnya dikelola dengan pendekatan yang lebih profesional melalui adanya struktur organisasi yang jelas untuk mengatur berbagai fungsi operasional di dalamnya. Harga barang telah ditetapkan secara pasti dan tercantum dengan jelas, sehingga tidak membuka ruang bagi proses tawar-menawar. Konsekuensinya, interaksi komunikasi antara penjual dan pembeli relatif lebih terbatas jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Meskipun demikian, pasar modern tetap memiliki kontribusi penting dalam pemulihan pasca konflik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara konsisten dan pada aspek regulasi yang terkait dengan peran pemerintah serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan pasar. Kedua aspek ini menjadi relevan dalam konteks membangun kembali kondisi sosial masyarakat secara kolektif setelah terjadinya konflik.

D. Tempat Pemberdayaan Masyarakat

Baik pasar tradisional maupun pasar modern memiliki orientasi yang sama dalam mendukung pengembangan ekonomi secara kolektif dengan landasan komunitas. Oleh karena itu, keberadaan pasar tidak dapat dipisahkan dari konsep pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data dari berbagai sumber yang membahas isu serupa, diperoleh temuan analitis yang menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan terkait aspek pemberdayaan dalam konteks pasar tradisional maupun pasar modern.

Pasar Tradisional

Karakteristik wilayah serta basis pengunjung pasar tradisional yang sebagian besar berasal dari masyarakat pedesaan menjadikan pasar ini sebagai ruang yang banyak memberdayakan pedagang kecil, petani, serta pelaku usaha mikro. Selain itu, pengelolaan pasar tradisional cenderung lebih dinamis, sehingga memungkinkan keterlibatan masyarakat secara fleksibel melalui aksi kolektif yang relatif terbuka dan partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tradisional memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan pasca konflik, baik dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan sosial, pemulihan ekonomi, penguatan kohesi sosial, dukungan kebijakan pemerintah, maupun pemberdayaan komunitas. Dari perspektif pemberdayaan, pasar tradisional menunjukkan potensi besar untuk melibatkan masyarakat secara luas tanpa adanya dominasi atau monopoli oleh pihak tertentu, sehingga mampu menciptakan ruang ekonomi yang lebih inklusif.

Pasar Modern

Pengelolaan pasar modern yang terstruktur dengan dasar manajemen yang jelas dan tentunya pembagian tugas yang relatif lebih terstruktur dapat diketahui bahwa tugas dari hal ini memiliki kecenderungan pengelolaan yang relatif lebih modern dan terstruktur sehingga keterlibatan dari masyarakat cenderung berbasis pada nilai profesional dengan latar belakang yang relatif sejalan dengan Rendah, sebagian besar dikelola oleh perusahaan besar atau waralaba. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar modern mampu untuk dapat berkontribusi dalam proses pemulihan konflik sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan, keadilan sosial, pemulihan ekonomi, kohesi sosial dan keadilan, pemerintah dan kebijakan, dan pemberdayaan Masyarakat.

E. Tempat Aktivitas Ekonomi

Lokasi pasar, baik tradisional maupun modern, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola aktivitas ekonomi dan interaksi sosial yang berlangsung di dalamnya. Letak geografis pasar tidak hanya menentukan jenis pengunjung yang datang, tetapi juga mencerminkan keterhubungan pasar dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Hasil pengolahan data memperlihatkan adanya perbedaan mendasar terkait lokasi antara pasar tradisional dan pasar modern, yang menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana keduanya berkontribusi terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasar Tradisional

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, diketahui bahwa pasar tradisional umumnya berlokasi di wilayah perdesaan. Kondisi geografis ini membuat pasar tradisional cenderung memiliki pengunjung dengan karakteristik demografis yang kolektif serta ditandai oleh tingkat kelekatan sosial yang tinggi. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pasar tradisional berperan penting dalam proses pemulihan pasca konflik, khususnya melalui aspek pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan sosial, pemulihan ekonomi, kohesi sosial, dukungan kebijakan pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tingkat keterjangkauan pasar tradisional yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dari kelas ekonomi menengah ke bawah maupun ke atas, memperkuat kontribusinya terhadap pemulihan sosial-

ekonomi. Dengan demikian, pasar tradisional menjadi instrumen penting dalam membangun kembali keadilan sosial, memperkuat kohesi, dan menciptakan ruang inklusif bagi masyarakat pasca konflik.

Pasar Modern

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, diketahui bahwa pasar modern umumnya berlokasi di wilayah perkotaan. Keberadaan pasar modern di area urban sangat relevan karena ditopang oleh infrastruktur yang relatif lebih baik dan mendukung kelancaran operasional pasar tersebut. Selain itu, karakteristik masyarakat perkotaan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan turut membentuk pola interaksi dan konsumsi yang khas di pasar modern. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar modern memiliki potensi kontribusi dalam pemulihan pasca konflik, terutama melalui aspek pemenuhan kebutuhan, keadilan sosial, pemulihan ekonomi, penguatan kohesi sosial, dukungan kebijakan pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan fasilitas dan lingkungan urban yang memadai, pasar modern dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat setelah mengalami konflik.

F. Tempat bagi Masyarakat untuk Berkontribusi

Fungsi lainnya pasar tradisional dan pasar modern adalah kontribusinya terhadap masyarakat. Kontribusi yang dimaksud merujuk pada sejauh mana masyarakat dapat terlibat serta memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan keberadaan pasar, baik tradisional maupun modern. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh deskripsi mengenai bentuk kontribusi dari masing-masing jenis pasar yang dapat dijadikan dasar pemahaman lebih lanjut terkait perannya dalam dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasar Tradisional

Pasar tradisional umumnya dikelola secara lebih fleksibel dengan persyaratan administratif yang relatif sederhana, sehingga kerap dikategorikan sebagai bagian dari sektor usaha informal. Kondisi ini membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja informal sekaligus memperkuat perekonomian lokal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pasar tradisional memiliki kontribusi penting dalam pemulihan pasca konflik, khususnya pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan sosial, pemulihan ekonomi, penguatan kohesi sosial, dukungan kebijakan pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat. Fleksibilitas dalam sistem pengelolaannya juga memberikan manfaat signifikan karena memungkinkan keterlibatan masyarakat secara lebih terbuka, sehingga memperkuat peran pasar tradisional sebagai ruang inklusif dalam mendukung pemulihan sosial-ekonomi.

Pasar Modern

Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern umumnya dikelola secara formal dengan penerapan aturan yang ketat. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan lebih bersifat formal dan berlangsung dalam skala besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar modern memiliki peran penting dalam proses pemulihan pasca konflik, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat, keadilan sosial, pemulihan ekonomi, penguatan kohesi sosial, dukungan kebijakan pemerintah, serta pemberdayaan komunitas. Kontribusi yang paling menonjol dari

pasar modern terletak pada pemenuhan kebutuhan, pemulihan ekonomi, dan dukungan kebijakan. Ketiga aspek tersebut dapat dioptimalkan melalui keberadaan pasar modern yang umumnya berada di kawasan perkotaan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda dari pedesaan, sehingga memungkinkan kontribusi yang lebih luas terhadap pemulihan sosial-ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat adanya perbedaan karakteristik yang cukup signifikan antara pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan tersebut dapat dirumuskan secara lebih sistematis melalui penyajian dalam bentuk matriks, sehingga mampu memperjelas aspek-aspek pembeda utama dari kedua jenis pasar. Adapun deskripsi perbedaan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1: Matriks Perbandingan antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Fungsi Pasar Tradisional Pasar Modern

- mg	1 4041 114410101141	1 10 10 11
Tempat berkumpul beragam pengunjung	Didominasi oleh masyarakat lokal, dari berbagai latar belakang sosial ekonomi	Didominasi oleh kelas menengah ke atas, dengan kecenderungan gaya hidup urban
Tempat komunikasi dengan beragam gaya komunikasi	Interaksi langsung, akrab, sering melibatkan tawar-menawar	Minim interaksi; lebih individual dan transaksional karena sistem swalayan
Tempat terjadinya transaksi jual beli	Harga fleksibel dan bisa dinegosiasikan (tawar-menawar umum)	Harga tetap dan sudah tertera secara pasti
Tempat Pemberdayaan Masyarakat	Tinggi, banyak memberdayakan pedagang kecil, petani, dan pelaku usaha mikro	Rendah,sebagian besar dikelola oleh perusahaan besar atau waralaba
Tempat aktivitas ekonomi	Perdesaan	Perkotaan
Tempat bagi Masyarakat berkontribusi	Memberikan peluang kerja informal, memperkuat ekonomi lokal	Kontribusi ekonomi lebih bersifat formal dan skala besar

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2025

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern terletak pada gaya komunikasi, objek negosiasi berupa harga barang, dan kemampuan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam konteks pasca konflik,

pasar berfungsi bukan hanya sebagai pusat perdagangan tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar. Pasar tradisional, dengan fleksibilitas harga dan interaksi sosial yang intens, lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat rentan sehingga dapat memperkuat rasa aman dan kebersamaan (Lederach, 1997). Sementara itu, pasar modern menawarkan stabilitas harga dan kualitas produk, tetapi aksesnya cenderung terbatas pada kelas menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tradisional lebih relevan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat pada tahap awal pemulihan pasca konflik (Johnson, 2023).

Pasar tradisional memberi kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi karena memberdayakan petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro. Proses tawar-menawar bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga medium memperkuat jaringan sosial dan rasa saling percaya antarwarga (Barakat, 2005). Sebaliknya, pasar modern berperan pada pertumbuhan ekonomi makro dengan struktur lebih formal dan terorganisir. Namun, interaksi sosial di dalamnya sangat minim, sehingga kurang mendukung terbentuknya kohesi sosial (Paris, 2004).

Pasar tradisional sering kali beroperasi dengan regulasi sederhana dan informal. Agar dapat berfungsi optimal pasca konflik, diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi, perlindungan hukum, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung inklusivitas (Collier et al., 2003). Pasar modern, di sisi lain, sangat bergantung pada sistem hukum dan perizinan formal, sehingga keberadaannya dapat dijadikan indikator stabilitas tata kelola dan rule of law di wilayah pasca konflik (Tadjbakhsh, 2011).

Pemberdayaan komunitas menjadi aspek krusial dalam pembangunan damai jangka panjang. Pasar tradisional merupakan arena utama pemberdayaan karena melibatkan pelaku usaha kecil secara langsung dan memperkuat kemandirian lokal (Johnson, 2023). Meskipun pasar modern didominasi perusahaan besar, dalam jangka panjang ia dapat membuka peluang kerja formal yang mendukung transisi masyarakat menuju stabilitas ekonomi (Paris, 2004).

Dengan demikian, pemulihan pasca konflik sosial perlu dipandang secara menyeluruh. Integrasi aspek keamanan dan kebutuhan dasar, pemulihan ekonomi serta kohesi sosial, dukungan pemerintah dan hukum, serta pemberdayaan komunitas menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang damai, inklusif, dan resilien dalam jangka panjang. Pasar tradisional lebih strategis pada tahap awal recovery pasca konflik karena mampu menjamin kebutuhan dasar, memperkuat kohesi sosial, dan memberdayakan komunitas. Pasar modern menjadi penting pada tahap lanjutan untuk mengokohkan perekonomian formal, mendukung tata kelola hukum, dan menyediakan lapangan kerja terstruktur. Integrasi keduanya dapat membentuk fondasi yang mendukung terciptanya masyarakat damai, inklusif, dan resilien (Lederach, 1997; Johnson, 2023).

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa pasar memiliki fungsi yang cukup penting sebagai katalisator dalam upaya recovery setelah konflik sosial. Pada pelaksanaannya pasar sebagai fasilitas public sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial di tnegah Masyarakat secara intens. Pasar kemudian dapat dibedakan menjadi dua yakni pasar tradisional dan pasar modern. Jika ditinjau dari hasil kajian literatur pasar tradisional dan pasar modern memiliki perbedaan mendasar, namun keduanya sama-sama penting dalam mendukung pemulihan pasca konflik sosial. Pasar

tradisional, dengan sifat fleksibel, keterjangkauan harga, serta basis komunitas yang kuat, berperan dalam memperkuat kohesi sosial, membangun solidaritas, serta memberdayakan masyarakat kecil seperti pedagang, petani, dan pelaku usaha mikro. Sementara itu, pasar modern dengan sistem formal, harga tetap, dan infrastruktur memadai, lebih menekankan pada stabilitas ekonomi, efisiensi, serta kepastian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat urban. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan karakteristik antara pasar tradisional dan pasar modern bukanlah kelemahan, melainkan potensi saling melengkapi. Pasar tradisional menghadirkan ruang interaksi sosial yang inklusif, sementara pasar modern menyediakan struktur ekonomi yang lebih stabil. Keduanya, jika dikelola secara seimbang, dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun kembali masyarakat yang damai, inklusif, dan resilien setelah mengalami konflik.

Perlu upaya untuk dapat menindaklanjuti hal ini dengan beberapa strategi seperti Pertama, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu mengintegrasikan kekuatan pasar tradisional dengan pasar modern. Pasar tradisional perlu difasilitasi agar tetap menjadi ruang sosial yang inklusif dan pemberdayaan komunitas, sementara pasar modern harus didorong agar berfungsi optimal dalam menyediakan kebutuhan secara stabil dan berkelanjutan. Kedua, penting dilakukan program pemberdayaan masyarakat berbasis pasar, baik melalui pelatihan, dukungan modal, maupun penguatan kelembagaan, agar masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan pasar sebagai sarana peningkatan kesejahteraan sekaligus rekonsiliasi sosial. Selanjutnya yang Ketiga, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji bagaimana interaksi antara pasar tradisional dan pasar modern dapat dirancang sebagai model pembangunan pasca konflik yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat jaringan sosial, keadilan, dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Konflik Sosial di Indonesia 2023–2024. Jakarta: BPS.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2021). Systematic Approaches to a Successful Literature Review (3rd ed.). Sage Publications.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
- Bruce, H. (2009). Contextual Factor in Assessing Children And Adolescent. In T. Kaplan (Ed.), *Children And Adolescents With Mental Health Problem*. RCPsych Publication.
- Burton, J. (1990). Conflict: Resolution and Provention. London: Macmillan.
- Chambers, R. (1997). Whose Reality Counts? Putting the First Last. London: Intermediate Technology Publications.
- Colletta, N. J., & Cullen, M. L. (2000). The Nexus Between Violent Conflict, Social Capital

- and Social Cohesion: Case Studies from Cambodia and Rwanda. World Bank Publications.
- Collier, P., Elliott, L., Hegre, H., Hoeffler, A., Reynal-Querol, M., & Sambanis, N. (2003). Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. Washington, DC: World Bank.
- Collier, P., Hoeffler, A., & Soderbom, M. (2003). "On the Duration of Civil War." *Journal of Peace Research*, 41(3), 253–273.
- Collier, P., Hoeffler, A., & Söderbom, M. (2003). *On the Duration of Civil War*. Journal of Peace Research, 41(3), 253–273.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fukushima, K. (2001). Sociology of Social Problems. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Galtung, J. (1969). "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Habibullah. (2019). Permasalahan Dan Prospek Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. *SOSIO KONSEPSIA*, *8*, 227–240. https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1785
- Hayner, P. (2011). *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*. New York: Routledge.
- Hayner, P. B. (2011). *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*. New York: Routledge.
- Irmayani, N. R. (2019). *Diseminasi Hasil Penelitian Tahun 2019*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. http://puslit.kemsos.go.id/berita/467/diseminasi-hasil-penelitian-tahun-2019#sthash.blzdNZsJ.dpbs
- Johnson, Herman. (2023). Exploring The Elements and Phases of Peacebuilding in Post-Conflict Communities in Negeria. *Jalingo Journal of Social and Management Science*. Volume 5, Number 1, Oktober 2023.
- Katadata. (2023). *Jumlah Konflik Sosial di Indonesia*. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id
- Katadata. (2024). *Jumlah Konflik Sosial di Indonesia Meningkat Awal 2024*. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2017). *Revitalisasi Pasar Tradisional: Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Kemendag.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for Performing Systematic Literature

- Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. Psychological Review, 50(4), 370–396.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington, DC: World Bank.
- North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13.
- Nurhayati, S. (2020). "Tinjauan Sosial Ekonomi atas Perkembangan Pasar Modern dan Dampaknya pada Pasar Tradisional." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 21(1), 44–55.
- OECD. (2008). Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations. Paris: OECD Publishing.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. Blackwell Publishing.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press.
- Setiawan, H. H. (2017, July 31). Paradigma Baru Bantuan Sosial. *Kompas*. https://kompas.id/baca/opini/2017/07/31/paradigma-baru-bantuan-sosial/
- Simpson, L, M., Stahl, A, N., Francis, & Anderson, M. (2004). Reading and Learning Strategies: Recommendations for the 21st Century. *Journal of Developmental Education*, 28, 2–15.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sphere Project. (2018). *The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*. Geneva: Sphere Association.
- Stewart, F. (2008). Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in

- Multiethnic Societies. Palgrave Macmillan.
- Suwarno, P. (2015). Konflik Sosial di Pasar Tradisional: Studi Kasus Tata Kelola dan Ketimpangan Akses Ekonomi. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 20(1), 55–72.
- Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428.
- UNDP. (2008). *Community-Based Approaches to Peacebuilding*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2008). *Post-Conflict Economic Recovery: Enabling Local Ingenuity*. New York: United Nations Development Programme.
- UNHCR. (2019). *Handbook for Emergencies*. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.
- Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. New Haven: Yale University Press.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii.
- Widodo, T. (2015). Dinamika Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam Perspektif Sosial Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 16(2), 115-128.
- World Bank. (2011). World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. Washington, DC: World Bank.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112.
- Zastrow, C. (2010). Introduction to Social Work and Social Welfare:

 Empowering People (10th ed.).

 Brooks/Cole Cengage Learning